

**KEWENANGAN DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
GUNUNG BINTAN MELALUI (INDIKATOR PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT)
DESA BINTAN BUYU KABUPATEN BINTAN**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh

ENDRA KAPUTRA

NIM. 110565201223

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : ENDRA KAPUTRA

NIM : 110565201223

Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jl. Taman Sari Tanjung Uban

Nomor Telp : 085263743775

Email : endrakaputra27@gmail.com

Judul Naskah : Kewenangan Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Bintang Melalui (Indikator Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat) Desa Bintang Buyu Kabupaten Bintang

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Afrizal,S.Ip,M.Si
NIP. 198304032015041001

Nazaki, M.Si
NIP.198707182014042001

**KEWENANGAN DESA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
GUNUNG BINTAN MELALUI (INDIKATOR PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT)
DESA BINTAN BUYU KABUPATEN BINTAN**

**ENDRA KAPUTRA
AFRIZAL
NAZAKI**

ABSTRAK

Keberadaan Desa Bintan Buyu di jalur wisata Bintan-Tanjungpinang di Km 36 dan berjarak 55 Km dari Tanjungpinang merupakan alternative bagi wisatawan karna memiliki potensi agro wisata dan sekaligus potensi desa wisata. Tantangan utama adalah belum adanya kapasitas yang cukup pada masyarakat untuk secara mandiri dapat mengelola pembangunan di daerahnya termasuk pembangunan pariwisata.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bintan Buyu melalui Kewenangan desa Bintan Buyu dalam mengelola Pariwisata Gunung Bintan dengan menggunakan indicator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Desa Bintan Buyu dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya, sehingga kegiatan pariwisata Gunung Bintan dapat menjadi bentuk pariwisata berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut peningkatan kualitas masyarakat harus menjadi perhatian utama, agar masyarakat mampu menciptakan produk-produk kepariwisataan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif dipasar internasional sehingga mampu meningkatkan dan mewadahi potensi masyarakat dan potensi pariwisata Gunung Bintan di Desa BIntan Buyu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian.

Kata Kunci : Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Desa
Bintan Buyu

ABSTRACT

The existence of Bintan Buyu village in Bintan Tanjungpinang travel lane at Km 36 and within 55 Km from Tanjungpinang is an alternative for tourists because has the potential of agro-tourism and tourist village at the same potential. The main challenge is the lack of sufficient capacity in the community to independently manage local development including tourism development.

This study aims to identify ways to improve the welfare of the villagers Bintan Buyu through the village Authority Bintan Buyu manage Gunung Bintan Tourism using community-based tourism development indicator. With the tourism products on offer, the most appropriate referral is raised original character in the village of Bintan Buyu wisatamya product development strategy, and then arranged the framework of its development, so that the activities of Gunung Bintan tourism can be a form of sustainable tourism.

To support the improvement of the quality of society should be a major concern, so that people can create products of tourism that have a competitive advantage and comparative international market so as to improve and facilitate the potential of the community and the tourism potential of Gunung Bintan Village Bintan Buyu to increase the welfare of society during These rely on the income from agriculture.

Keywords: *Tourism, Community Based Tourism Development, Rural Bintan Buyu*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam sektor dunia. Sektor tersebut berkembang atau mundur maka banyak Negara akan akan terpengaruh secara ekonomis. Kegiatan Pariwisata hakikatnya merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara suka rela dan tanpa paksaan, untuk objek dan atraksi wisata. Dalam perkembangannya industri pariwisata ini mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.

Dalam pengelolaan pariwisata pemerintah tidak lepas tangan untuk mendorong kemajuan pariwisata yang ada di Indonesia, bahkan pengelolaan pariwisata juga diserahkan kepada pemerintah hingga ke level yang paling bawah seperti kelurahan/desa, ini menunjukkan bahwa desa juga mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pariwisata yang di daerahnya terdapat objek pariwisata.

Dalam hal ini desa jika dijabarkan pengertian yang lebih luas lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas pembahasan luas wilayah secara fisik saja, desa juga mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi kemajuan desa, salah satu faktornya melalui kewengan untuk pengembangan pariwisatanya.

Desa juga dikatakan bahwa pemerintah desa perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki peranan yang sangat strategis dalam

pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat atau desa. Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggara pemerintah yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi terendah langsung dibawah camat.

Dapat diketahui bahwa desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai perangkat desa. Namun, kewenangan itu tidak serta merta bebas tanpa ada batas. Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada, selain itu juga karakter lokal masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai satu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Hal tersebut harus menjadi sorotan untuk memperkenalkan kekayaan yang terdapat di suatu desa tersebut seperti : adat istiadatnya, alamnya, dan sebagainya yang

mempunyai daya tarik tersendiri sehingga bisa menjadikan salah satu obyek pariwisata. Yang bisa mempengaruhi taraf ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya agar desa tersebut menjadi desa yang menjadi unggulan dan menjadi desa wisata.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantara kewenangan desa antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

Pengembangan pariwisata adalah salah suatu bentuk dari kewenang yang dimiliki oleh desa yang akan memberikan dampak positif. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun kehidupan sosial ekonomi penduduk yang berada di

sekitar obyek wisata. Pariwisata di negara berkembang sering dianggap tidak membawa keuntungan ekonomi yang signifikan, baik di Negara tujuan maupun bagi masyarakat lokal. Ketimpangan ini terjadi karna sebagian besar usaha pariwisata bersekala besar dimonopoli oleh pengusaha besar. Usaha pariwisata jenis ini menetapkan berbagai standar tertentu bagi setiap aspek kegiatannya.

Community based tourism merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung pada insutri pariwisata. Hal ini dilakukan dengan bentuk memberikan kesempatan dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang bertujuan pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis termasuk dalam pembagian keuntungan bagian dari kegiatan pariwisata yang sering kali mengabaikan peran serta masyarakat lokal didaerah tjuan wisata. Gagasan tersebut disampaikan untuk mengkritisi pembangunan pariwisata yang sering sekali mengabaikan peran serta masyarakat lokal daerah tujuan wisata. Penekanan pada pola kehidupan tradisional merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan, mempersiapkan interaksi spontan antar masyarakat dan wisatawan atau pengunjung untuk dapat memberikan pengertian dan pengetahuan pengunjung tentang lingkungan dan kebudayaan setempat selain memberikan rasa

bangga masyarakat lokal terhadap kebudayaannya.

Konsep *community based tourism* merupakan dasar yang menegaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri. Penekanan pada pola kehidupan tradisional merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan, mempersiapkan interaksi spontan antara masyarakat dan wisatawan atau pengunjung untuk dapat memberikan pengertian dan pengetahuan pengunjung untuk dapat memberikan pengertian dan pengetahuan pengunjung tentang lingkungan dan kebudayaan setempat selain memberikan rasa bangga masyarakat lokal terhadap kebudayaan dan potensi pariwisata di daerah tersebut.

Dibandingkan dengan daerah lain, Bintang mungkin kalah. Namun Bintang tetap bisa dikatakan sebagai daerah tujuan wisata yang masih di minati. Bintang sendiri banyak memiliki wisata yang mempunyai taraf lokal hingga internasional, seperti wisata lagoi, trikora, hutan mangrove dan wisata gunung bintang. Dalam Peraturan Bupati Bintang Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 7 Tentang Destinasi Pariwisata Unggulan daerah adalah Kawasan Wisata Internasional Lagoi, Kawasan Wisata Pantai Trikora, Kawasan Gunung Bintang, Kawasan Sungai Lepah.

Pada tahun ini saja , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

(DPPKAD) binta menaikan target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari lini perhotelan di sektor pariwisata. Pada tahun 2015 pemasukan dari sektor perhotelan sebesar Rp. 61 miliar. Karna itu pada tahun 2016 ini, menargetkan PAD dari sektor ini bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp 62 Miliar (Kasi pembukuan DPPKAD Bintan. Setelah di akumulasi, total target PAD Bintan dari sektor pariwisata tahun ini mencapai Rp. 178 Miliar atau naik Rp. 1 Miliar dari tahun sebelumnya.

Seperti salah satu destinasi pariwisata gunung bintang Desa Bintang Buyu, yang terletak di tengah-tengah pulau bintang dan berjarak sekitar 55 Km dari kota Tanjungpinang (Ibukota Provinsi kepulauan Riau) ini merupakan kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat ekosistem khas hutan hujan tropis yang masih terjaga keasliannya, baik aspek flora maupun faunanya.

Pengunjung akan mendapti banyak hal menarik selama mendaki gunung ini. Gunung yang puncak dapat dicapai dalam waktu hanya dua jam dengan berjalan kaki ini menyimpan panorama alam yang mempesona. Dari puncak gunung, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan di sekeliling pulau bintang. Bukan hanya itu saja kawasan wisata gunung bintang ini juga mempunyai kegiatan tahunan yang sangat di tunggu oleh masyarakat Bintang bahkan tanjung pinang

dan batam. Pada bulan juli, wisatawan yang berwisata kepulauan bintang bisa menyaksikan acara-acara khas pariwisata yang biasa digelar dikawasan ini. Acara yang digelar setiap tahun ini bernama “Bintang Mountain Tracking and Durian Party”. Acara tersebut adalah perlombaan menyusuri jalan berundak menuju puncak gunung pada malam hari yang kemudian diakhiri dengan pesta makan durian dan ikan bakar, total durian yang panitia siapkan sebanyak 2.000 buah, pengunjung juga bisa sambil bersantai sambil menikmati hiburan kesenian melayu maupun artis ibu kota yang hadir dalam kegiatan ini.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti Desa Bintang Buyu yang memiliki kewenangan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan usulan penelitian yang di beri judul “ *Kewenangan Desa dalam Pengembangan pariwisata (Indikator pengembangan pariwisata Berbasis Masyarakat) Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang.*”

B. LANDASAN TEORI

1. Desa

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan belukar, dapat juga wilayah yang

berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayah Masyarakat Desa. (Kartohadikusumo, 1988 : 16)
Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Widjaja, 2003:3).

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata

Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah desa di selenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala Desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pemerintah Desa sebagai badan terendah pemerintahan menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut jadi kehidupan masyarakat atau yang di perintah. Hal itu menunjukkan bahwa Desa sebagai badan pemerintahan memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat atau yang di perintah.

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama dengan BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi

Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Kewenangan

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kekuasaan berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan (2011:1) adalah kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan. Adapun kewenangan menurut budiharjo(2011:7) kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Adapun kewenangan menurut tonaer (2011:5) kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga Negara. Otoritas atau kewenangan sering didefenisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan kleminya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud otoritas atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau pembimbing bagi orang-orang lain.

4. Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantara kewenangan desa antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

5. Kebijakan

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

1. penyusunan agenda,
2. formulasi kebijakan,
3. adopsi kebijakan,
4. implementasi kebijakan, dan
5. penilaian kebijakan.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Murphy (1998) kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berbasis komunitas, yaitu bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata itu sendiri, dilain pihak komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan.

Dalam pengembangan kepariwisataan, aspek pemberdayaan komunitas lokal telah menjadi salah

satu kesepakatan dan komitmen yang harus diwujudkan untuk mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, yang menekankan terwujudnya kualitas sumber daya lingkungan, kualitas pengalaman wisata, serta kualitas kehidupan masyarakat lokal.

Menurut Inskeep (1991), Terdapat beberapa komponen pengembangan pariwisata yang berkaitan dengan pendekatan perencanaan pariwisata, yaitu : atraksi wisata yang mencakup wisata alam, budaya, dan atraksi lainnya. Akomodasi berupa hotel dan jenis fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan yang menginap, fasilitas dan pelayanan wisata lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata mencakup transportasi darat, laut dan udara. Infrastruktur lainnya seperti penyediaan air bersih, tenaga listrik, telekomunikasi, dan lainlain. Elemen ini penting untuk mengatur dan merencanakan program-program yang dapat meningkatkan aktivitas pariwisata.

Masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki fungsi dalam perencanaan. Pertama, memberikan sumbangan berupa dukungan terhadap pelaku perencanaan dan aktifitasnya.

Kedua, adalah sumbangan dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan dalam rencan pembangunan, serta dalam mengidentifikasi dari pelaku perencanaan. Ketiga, adalah merupakan fungsi yang paling penting, yaitu sebagai pengawasan dalam hak-hak mereka sendiri dan hak orang lain dalam merancang dan penyerahan kebijaksanaan. Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperandalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Selain itu pengusaha dibidang juga berkewajiban mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pengembangan masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk

penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggara kepariwisataan. Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Berdasarkan pengembangan pariwisata dan kualitas objek wisata dan daya tarik wisata yang dijadikan sebagai indikator utama, pariwisata berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 7 (Tujuh) , sebagaimana terdapat dalam *Development of Community Based Tourism* yaitu :

1. *Basic Vistor Facilities*. Tipe ini terdiri dari atas fasilitas pariwisata yang sangat mendasar seperti akomodasi home stay dan restoran yang melayani pengunjung.
2. *Basic Vistor Facilities Plus Tourism Theme*. Tipe ini biasanya disediakan fasilitas dasar dengan tema tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung
3. *Handicraft Villages*. Penegmbangan tipe ini biasanya dilakukan pada desa-desa yang berfungsi sebagai pusat lokasi produksi dan penjualan hasil

kerajinan, dan juga merupakan desa yang masih kurang atau bahkan tidak memiliki atraksi lainnya.

4. *Hotels and Villages Communities*. Masyarakat di daerah ini berada disekitar hotel atau resot yang pembangunannya terintegrasi.
5. *Traditional tourism Villages*. Penembangan pariwisata ini menonjolkan budaya dan adat istiadat perdesaan, gaya hidup masyarakat, dan arsitektur tradisional yang dikemas dalam lingkungan yang menarik.
6. *Community Close To Primary Tourism Attraction*. Daya tarik dari desa ini adalah atraksi wisata alam dan buatan yang dipadukan sehingga menarik wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.
7. *Integrated and Organized Community Based Tourism*. Tipe ini terorganisasi dan terintegrasi berbasis masyarakat. Masyarakat telah mengetahui konsep jangka panjang, keberlanjutan dan manfaatnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sebagian pendapat mengatakan bahwa menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif adalah

“penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Dalam hal ini di uraikan hal-hal yang memerlukan suatu penjelasan ataupun gambaran yang mencari informasi yang bersifat deskriptif.

Sejalan dengan yang di ungkapkan oleh moleong (2006:3) mengdefenisikan bahwa. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Peneliti secara langsung masuk kelapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Melalui Konsep Pengembang Pariwisata Berbasis Masyarakat Desa di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Data yang dihimpun sesuai focus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi, dan peristiwa yang diobservasi.

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan lokasi penelitian di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan.

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, untuk pertama kali. Data ini berasal dari key informan dan informan. Meleong (2006 : 157) mengemukakan bahwa data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman dan foto.

Sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang ada (Sugiyono, 2010 : 129)

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak memungkinkan wawancara pada

1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara pada diterapkan sebagai teknik pengumpulan data (umumnya penelitian kualitatif) wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya penelitian telah mengalami dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi variabel dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, disamping akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh juga akan mendapatkan informasi penting. Informasi yang diperoleh dalam wawancara bermanfaat dalam menetapkan pemahaman dalam lingkungan terbatas dari realitas sosial. Wawancara juga berpengaruh oleh topik yang diteliti tidak menjadi persoalan berapa banyak subjek yang tidak menimbulkan respon, yang penting adalah hubungan langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data, sebagai alat pengumpul data yang penting, kusioner dan wawancara tidak sepenuhnya memuaskan, ada jenis-jenis masalah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh kedua alat pengumpulan data tersebut. Adakalanya penting dalam melihat perilaku alamiah melihat dinamika gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Proses observasi terdiri atas langkah-langkah (a) persiana, (b) memasuki lingkungan penelitian (c) memulai interaksi (d) pengamatan dan pencatatan (e) menyelesaikan tugas lapangan. Dimana peneliti secara aktif melakukan pengamatan sesuai rencana dalam rangka analisis dan selanjutnya hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam bentuk catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti. Tahap akhir

adalah menyelesaikan tugas lapangan, yaitu mengelola tahap awal data-data yang telah didapatkan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam analisis penelitian yang dilakukan. Dalam tahap akhir ini, dimungkinkan penambahan data apabila data hasil pengamatan yang telah dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan. Objek yang akan diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan desa dalam pengembangan pariwisata air terjun gunung bintang berbasis masyarakat di Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang.
2. Konsep Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat dalam mengkaji kesesuaian Desa Bintang Buyu sebagai desa wisata.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan adanya catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seorang (sugiyono,2010 : 329) dokumentasi yang dimaksud

disini adalah hasil data yang masuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan dan Desa Bintan Buyu.

Menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik penganalisaan triangulasi, yaitu menganalisa jawab subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek diperiksa dengan dokumen yang ada.

Patton dan Moeleong (2006:330:331) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu bisa dicapai dengan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
3. Membandingkan keadaan perspektif dengan berbagai pendapat dan orang seperti rakyat biasa, orang

berpendidikan menengah atau tinggi.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi satu dokumen yang berkaitan.

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan

Secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kekuasaan berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Dalam kewenangannya, desa berhak mengelola daerahnya untuk kemajuan baik dalam segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, hal ini yang menjadikan salah satu keuntungan bagi Desa Bintan Buyu yang memiliki alam yang bisa menjadi objek wisata alam. Tentunya dalam mengelola pariwisata ini ada langkah atau cara bagaimana pengembangan pariwisata tersebut.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan

menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantara kewenangan desa antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2. Indikator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

Indikator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu upaya untuk melihat sejauh mana objek Pariwisata Gunung Bintang menjadi pariwisata yang ideal sesuai indikator penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

a. *Basic Visitor Facilities*

Tipe ini terdiri atas fasilitas pariwisata yang sangat mendasar seperti akomodasi *home stay* dan

restoran yang melayani pengunjung. Tipe ini biasanya diperuntukan bagi desa yang terletak di rute yang terletak menuju objek dan daya tarik wisata. Tipe ini tidak melibatkan organisasi masyarakat dan pada tipe ini , manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal masih sedikit.

Dalam musyawarah yang dilakukan untuk membahas Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMD) hal tersebut yang saat itu menjadi urusan wajib untuk di prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur pariwisata gunung bintang, dimana saat itu pengunjung pariwisata meningkat. Dan disamping itu ada infrastruktur yang mendukung pariwisata gunung bintang dengan menyediakan penginapan hotel/vila yang dekat daerah pariwisata gunung bintang, hal ini juga sangat menjadi hal yang penting dalam pengembangan pariwisata gunung bintang.

Dalam pengembangan pariwisata hal ini juga sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata ,dikarenakan sesuai indikator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

b. Basic Visitor Facilities Plus Tourism Theme

Tipe ini biasanya menyediakan dasar tema tertentu untuk menarik pengunjung, misalnya dengan menetapkan event atau kegiatan yang bisa membuat wisatawan datang berkunjung menikmati pariwisata gunung bintang.

c. Handicraft Villages

Pengembangan tipe ini biasanya dilakukan pada desa-desa yang berfungsi sebagai pusat lokasi produksi dan penjualan hasil kerajinan, dan juga merupakan desa yang masih kurang atau bahkan tidak memiliki atraksi lainnya. Pengelolaannya cenderung berdasarkan pada ikatan keluarga atau kerja kelompok dan menggunakan tenaga kerja lokal.

d. Hotels and Villages Communities

Masyarakat di daerah ini berada disekitar hotel atau resort yang pembangunannya terintegrasi. Masyarakat mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan pariwisata tipe ini. Manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan pelatihan baik di hotel maupun dipusat

penjualan barang kerajinan, sedangkan manfaat lainnya adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, dan lain-lainnya.

e. Traditional Tourism Villages

Pengembangan pariwisata ini menonjolkan budaya dan adat istiadat perdesaan, gaya hidup masyarakat, dan arsitektur tradisional yang dikemas dalam lingkungan yang menarik.

Dalam pengembangan tipe ini bagaimana desa bisa menonjolkan karakteristik budaya yang dimiliki oleh desa tersebut agar pariwisata yang ada di desa bintang buyu juga menjadi lebih menarik dengan adanya bentuk budaya yang memang sudah ada di desa bintang buyu.

f. Community Close To Primary Tourism Attraction.

Daya tarik dari desa ini adalah atraksi wisata alam dan buatan yang dipadukan sehingga menarik wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

*g. Integrated and Organized
Community Based Tourism*

Tipe ini terorganisasi dan terintegrasi berbasis masyarakat. Masyarakat telah mengetahui konsep jangka panjang, keberlanjutan dan manfaatnya. Masyarakat pada tipe ini sudah mengerti akan kebutuhannya dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari bentuk konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui kewenangan desa dalam pengembangan pariwisata gunung bintan di desa bintan buyu, penulis menyimpulkan bahwa:

Kewenangan desa berhak mengelola daerahnya untuk kemajuan baik dalam segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, hal ini yang menjadikan salah satu keuntungan bagi Desa Bintang Buyu yang memiliki alam yang bisa menjadi objek wisata alam. Tentunya dalam mengelola pariwisata ini ada langkah atau cara bagaimana pengembangan pariwisata tersebut. Indikator pengembangan pariwisata menjadi salah satu upaya untuk melihat sejauhmana objek pariwisata gunung bintan menjadi pariwisata yang ideal sesuai indikator penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Kesesuaian pariwisata gunung bintan di desa bintan buyu dengan indicator pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan hasil analisis dengan metode wawancara pihak yang terlibat dalam kemajuan pariwisata gunung bintan tersebut bahwa secara umum pariwisata gunung bintan belum sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata. Dari 7 indikator pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwa kondisi pariwisata gunung bintan di desa bintan buyu belum berbasis masyarakat, masih banyak yang harus di lengkapi sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata gunung bintan yang terdapat 7 indikatornya yang hanya 2 saja yang mendekati kesesuaian dengan kriteria pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa bintan buyu perlu memprioritaskan kriteria yang belum terpenuhi, sehingga pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di desa bintan buyu ini nantinya dapat terlaksana secara optimal, dimana kegiatan pariwisata dapat kesejahteraan masyarakat namun tetap pada dapat melestarikan lingkungan desa bintan buyu terhadap objek pariwisata gunung bintan.

Dengan produk wisata yang ditawarkan, arahan untuk menunjang pariwisata gunung bintan harus menambahkan dengan mengangkat karakter asli desa bintan buyu dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan

kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di desa bintang buyu khususnya pariwisata gunung bintang dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut peningkatan kualitas masyarakat harus menjadi perhatian utama, misalnya dengan melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang cara menghasilkan nilai tambah dari produk pertanian, serta pelatihan terkait pengembangan pariwisata, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan produk-produk yang bisa di pasarkan di pariwisata gunung bintang.

Keterlibatan masyarakatnya harus lebih di tingkatkan lagi karna masih kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk memanfaatkan objek wisata yang sudah ada di pariwisata gunung bintang tersebut, padahal jika ini dimanfaatkan dengan secara maksimal bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya, dan kecintaan terhadap budaya harus selalu ditanamkan oleh petua-petua atau orang tua agar adanya generasi yang selalu melestarikan budayanya, bukan malah malu atau menghilangkan budaya yang sudah ada saat nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan dan menunjang agar pariwisata gunung bintang berkembang sangat baik bahkan bisa di ketahui seluruh daerah atau bisa saja sampai mancanegara dengan

memperkenalkan keaslian lingkungan alamnya, dan budaya yang masih terjaga secara regenerasi.

1. Pengelolaan pariwisata gunung bintang harus lebih kreatif menciptakan peluang-peluang atau gagasan yang bisa memicu minat wisatawan agar berkunjung ke objek pariwisata gunung bintang, dengan demikian pariwisata gunung bintang akan menjadi lebih maju dari sebelumnya
2. Diharapkan kepada pemerintah baik desa yang mempunyai kewenangan mengelola daerahnya dan dinas terkait akan hal pariwisata berkoordinasi terkait kemajuan pariwisata yang ada di desa bintang buyu, yang mana dalam peraturan bupati nomor 27 tentang penetapan destinasi pariwisata unggulan daerah ini agar lebih memberikan perhatiannya, karna hal ini juga menjadi factor kemajuan desa bintang buyu dan mengangkat perekonomian masyarakat desa bintang buyu dan menjadi pendapatan asli desa bintang buyu.
3. Diharapkan kepada masyarakat desa bintang buyu terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata gunung bintang, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada ini, masyarakat akan banyak mendapatkan manfaatnya, dan masyarakat juga jangan hanya menunggu himbauan dari pemerintah

desa atau pemerintah kabupaten bintang, karena seharusnya masyarakatlah yang harus sadar akan potensi yang dimiliki di daerahnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Pambudi, Himawan S. dkk, Politik Pemberdayaan: jalan Mewujudkan. Otonomi Desa, Yogyakarta, LAPPERA Pustaka Utama.

Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. Pemberdayaan :Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center For Strategic and International Studies.

Rr. Suhartini, Ahalim, dan Imam Kahmbali. 2009. Model-Model Pemberdayaan

Masyarakat. Yogyakarta. Penerbit:Pt Lkis Printing Cemerlang

Sugiono.2005 *Metode Penelitian Admintarsi*.Bandung :Alfa Beta.

Meleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian kualitatif Edisi Refisi*. Bandung :

Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus,

Jogjakarta:CAPS.

Hausler, Nicole dan Strradas, Wolfgang. 2003 *Traning Manual For Community*

Based Tourism. In Went, Zschoutau

Lea, John. 1995. *Tourism and Development in Third World*.London & New York

:Routledge.

Raharjo Adisasmita, Prof., Dr., M.Ec. *Pembangunan Perdesaaan; Pendekatan*

Partisipasif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. (Jakarta 2011).

Sofian Efendi & Tukiran . *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3SE, 2012

cetakan ketiga Puluh (Edisi Revisi).

Sugiyono. *Arahan Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta. 2010

Jurnal:

Andi Maya Purnama sari

Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung WisataToddabojo Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 1, April 2011, hlm 49-64.

Kesi Widjajanti

Model Pemberdayaan Masyarakat

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm 15-27

Undang-undang:

Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan

Urusan Pemerintahan Kabupaaten Bintang kepada Pemerintahan desa.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun
2008 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata
Unggulan Daerah Kabupaten Bintan.

Dokumen

Profil Desa Bintan Buyu Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2015

Surat Kepala Desa Bintan Buyu Nomor : 19
Tahun 2015

